

# PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN

## DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

**Sulastri<sup>1</sup>, Rohmad Yuliantoro C.W, S.E., M.Sc.<sup>2</sup>**

Universitas Ahmad Dahlan,<sup>1</sup> Dosen Universitas Ahmad Dahlan.<sup>2</sup>

Email : <sup>1)</sup> [sulastri1500012068@webmail.uad.ac.id](mailto:sulastri1500012068@webmail.uad.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine whether the financial performance of the area that is proscribed with the ratio of self-reliance and capital expenditure ratio affects the welfare of the community that is proscribed with the Human Development Index (HDI). The data in this study provides secondary data obtained directly from BPKAD office in West Nusa Tenggara Province (NTB) and on the website of Indonesian Central Board of Statistics with fiscal year 2012-2016. The research uses a data panel analysis with Eviews 9 analysis tool.*

*The results showed that the simultaneous and partial ratio of financial self-reliance to the region affects the Human Development Index (HDI) and the simultaneous and partial capital expenditure ratio affects the human development Index (HDI).*

**Key words: regional financial performance, regional financial self-reliance ratio, capital expenditure ratio and human development index (HDI)**

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah yang diprosikan dengan rasio kemandirian dan rasio belanja modal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan langsung dari kantor BPKAD di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan di situs web Badan Pusat Statistik Indonesia dengan tahun anggaran 2012-2016. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan alat analisis Eviews 9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio belanja modal secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

**Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

## **PENDAHULUAN**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Darise, 2009: 3).

Keuangan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan alokasi sumber daya daerah dan media yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan sehingga mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya (Askam, 2008) dalam (Suryaningsih, dkk 2015). Strategi dalam alokasi pengeluaran daerah dalam bentuk belanja daerah memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja daerah terdiri dari belanja modal dan belanja rutin. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset lainnya, seperti pembenahan infrastruktur bidang pendidikan, kendaraan publik, kesehatan yang menyebabkan masyarakat turut serta merasakan dampak positif dari pembenahan tersebut. Alokasi belanja modal berpedoman pada keperluan terhadap adanya infrastruktur yang layak demi memudahkan kegiatan operasional pemerintah secara umum. Alokasi belanja seharusnya digunakan untuk kegiatan jangka panjang, seperti membangun sarana dan prasana yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah aktiva tetap sehingga bermanfaat tidak hanya

dalam siklus akuntansi tetapi dalam pemeliharaan yang bersifat meningkatkan kegunaan dari aktiva tersebut (Andaiyani, 2012) dalam Ida & Ni Luh (2016).

provinsi NTB masih berada di posisi peringkat ke-5 dengan nilai IPM terendah dibandingkan dengan provinsi lain. Penilaian kinerja pemerintah daerah sangat penting sebab dengan dilakukannya penilaian kinerja diharapkan pemerintah daerah berkerja semakin baik, transparan, dan akuntabel (Sudrajat, 2011) dalam (Ni Nyoman, dkk, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman & dkk (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan uraian yang ada diatas maka penelitian ini terfokus pada “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).”

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **1. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM**

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sutrisna (2014) dengan penelitian yang berjudul pengaruh kemandirian keuangandaerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Bali, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sutrisna ini menunjukkan Variabel kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012. Kemandirian keuangan daerah yang tinggi menggambarkan bahwa suatu daerah telah mampu

memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri dan campur tangan pemerintah dalam skala kecil. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>:** Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

## 2. Pengaruh belanja modal terhadap IPM

Penelitian yang dilakukan Ida & Ni Luh (2016) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif pada peningkatan indeks pembangunan manusia di provinsi Bali. Semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula indeks pembangunan manusia yang ada di provinsi Bali. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

**H<sub>2</sub>:** Rasio Belanja Modal Daerah Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah diatas kemandirian daerah pada tahun 2012 sebesar 9.21%, tahun 2013 9.91%, tahun 2014 14%, tahun 2015 12% dan tahun 2016 11.75%. ditahun pertama dan kedua provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat dikatakan masih sangat kurang mandiri artinya masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan ditahun ketiga mengalami kenaikan menjadi 14% tetapi masih kurang mandiri untuk tahun ke empat dan kelima masih dalam taraf kurang mandiri. Jadi dapat disimpulkan kemandirian

keuangan daerah pada provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) rendah dan masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. .

### **Rasio Belanja Modal**

Berdasarkan tabel perhitungan rasio belanja modal tahun 2012-2016 dapat dilihat bahwa belanja daerah yang dialokasikan ke belanja modal rata-rata 21%. Tahun 2012 sebesar 19.77% ini menunjukkan antara belanja modal dan belanja daerah tidak serasi, tahun 2013 sebesar 21.65% ini menunjukkan kurang serasi antara belanja daerah dan belanja modal, begitupun di tahun 2014, 2015 dan 2016. Rasio belanja modal tertinggi di tahun 2016 sebesar 24.02%, sedangkan rasio belanja modal paling rendah pada tahun 2012 sebesar 19.77%. dapat di simpulkan total belanja daerah yang ada di provinsi NTB yang dialokasikan ke belanja modal hanya sekitar 20% saja.

### **Uji Chow**

Tabel 4.2.1 Hasil Uji chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	102.130046	(9,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	161.319765	9	0.0000

Sumber :*Output Eviews 9*

Berdasarkan hasil uji chow di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-square sebesar 0.0000 sehingga menyebabkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka model fixed adalah model yang sebaiknya digunakan untuk analisis data panel, karena yang terpilih adalah model *fixed effect* maka perlu dilakukan uji Hausman untuk melihat apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang sebaiknya di gunakan.

## Uji Hausman

Tabel 4.2.2 Hasil uji hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.058224	2	0.9713

Sumber :*Output evIEWS 9*

Berdasarkan hasil uji hausman di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-square sebesar 0.9713 sehingga menyebabkan  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Maka model *random effect* yang sebaiknya digunakan untuk analisis data panel, karena nilai probabilitas lebih dari 5 %.

## Uji F

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Eviews 9, dengan model random efek, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 4.4.1 hasil uji f

F-statistic	6.292271	Durbin-Watson stat	0.68937 4
Prob(F-statistic)	0.003790		

Sumber :*Output Eviews 9*

Dari hasil diatas diketahui nilai F-statistik sebesar 6.292271 dan probabilitas F sebesar 0.003790 dalam taraf nilai signifikansi 5 % (0.05) maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas (independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut kabupaten/kota diprovinsi NTB.

## Uji T

Uji t akan menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing variabel bebas secara individu signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Tabel 4.4.2 hasil uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.128165	0.054286	2.360899	0.0224
X2	0.119578	0.051320	2.330034	0.0241

Sumber : *Output Eviews 9*

Hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas untuk variabel X1 (rasio kemandirian daerah) sebesar 0.0224 dalam taraf nilai signifikansi 5% (0.05) maka hipotesis pertama diterima, sehingga rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) menurut kabupaten/kota diprovinsi NTB. Nilai probabilitas sebesar 0.0241 dalam taraf signifikansi 5% (0.05) maka hipotesis kedua diterima.

### 1. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t-statistik (t-hitung) sebesar 2.360899 dan nilai probabilitas sebesar 0.0224, dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah secara parsial atau secara individu berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB.

### 2. Pengaruh rasio belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t-statistik (t-hitung) sebesar 2.330034 dan nilai probabilitas sebesar 0.0241, dengan nilai signifikansi 0.05 (5%) maka hipotesis dua diterima

karena nilai probabilitas lebih kecil daripada 5% dan dapat disimpulkan bahwa X2 (rasio belanja modal) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB.

#### 4.4.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan suatu variasi variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4.3 uji R<sup>2</sup>

R-squared	0.211205
-----------	----------

Sumber : *Output Eviews 9*

Dilihat dari hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0.211205. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) sebesar 21.12%. Sisanya sebesar 78.88% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi belanja daerah sebagai pengukur kinerja keuangan daerah dan sebagai variabel independennya sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai pengukur kesejahteraan masyarakat dan sebagai variabel dependen.

Penelitian ini dilakukan di provinsi NTB dengan populasi seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data didapatkan dari kantor



BPKAD (badan pengelolaan keuangan dan aset daerah) di provinsi NTB dan di Badan pusat statistik indonesia <http://bps.go.id> . Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan daerah diproksikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini dikarenakan rasio kemandirian yang tinggi akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) begitupun sebaliknya ketika kemandirian keuangan daerah rendah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun.

2. Kinerja keuangan daerah diproksikan dengan rasio belanja modal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti, ketika rasio belanja modal naik maka indeks pembangunan manusia (IPM) juga naik, sebaliknya ketika rasio belanja modal turun maka indeks pembangunan manusia (IPM) juga turun.

## **KETERBATASAN**

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan bukan tahun anggaran terbaru. Sehingga tidak terlalu mewakili kondisi saat ini.

## **SARAN**

- a. pada peneliti selanjutnya agar memperluas penelitian dengan menambah tahun penelitian dengan melihat fenomena atau fakta terbaru yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
- b. bagi peneliti selanjutnya agar memilih rasio keuangan daerah lebih banyak lagi, misalnya rasio efektivitas, rasio derajat desentralisasi, dan lain-lain.

c. bagi pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan agar meningkatkan lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui alokasi belanja yang tepat, seperti pengalokasian dana untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja seperti yang tertera dala UU Nomor 15 tahun 2013 (Ida & Ni Luh, 2016).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, R., Sari, D., & dkk (2011). *Cara cerdas menguasai EVIEWS*. Jakarta: Salemba Empat
- Ademirna.(Oktober 2016).pengaruh kinerja keuangan, opini audit, dan lingkungan masyarakat terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuanganpemerintah daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel Moderating.
- Basri, F., & Munandar, H. (2009).*Laskar Ekonomi Indonesia: kajian danRenungan terhadap masalah-masalah, structural, transformasi baru dan prospek perekonomian Indonesia* (Edisi 1). Jakarta: Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistic Indonesia*. Jakarta, Indonesia
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 permendagri* (Edisi 1). Jakarta: Pt Indeks.
- DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) (2019). Jakarta, Indonesia
- Dewi, P., & Sutrisna, I. (2014). Pengaruh kemandirian keuaangan daerah danPertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi bali. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Bali*. 4 (1), 32-40.
- Fauziah, H. (2014). *Sejarah dan Perkembangan Otonomi Daerah di indonesia.Jurnal online*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate: Dengan program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate: Dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: SalembaEmpat.
- Ida, A., & Ni Luh, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *E-jurnal akuntansi universitas udayana*. 15 (3), 2409-2438.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen* (Edisi 1). Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran kinerja sektor public* (Edisi 1). Yogyakarta:BPFE - Yogyakarta.
- Nehen, Ketut .(2012). *Perekonomian Indonesia* . Udayana University Press. Bali
- Purnomo, R. (2016). *Analisis statistic ekonomi dan bisnis dengan SPSS: Untuk;Mahasiswa, dosen, dan praktisi* (Edisi 1). Ponogoro: CV. Wade Group.
- Putry, N., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadapOpini audit dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal riset manajemen dan Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana*, 12(1), 25-35.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah*. Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Suryaningsih, N., Utama, M., & Yasa, I. (2015). Dampak kinerja keuagan daerahterhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4.08 (2015), 537-554.
- Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. (2017). *Analisis anggaran belanja daerah Pemerintah kota tomohon & pemerintah kabupaten minahasa selatan Manado*, Jurnal EMBA, 5.02 (2017), 1214-1224
- Widarjono, A. (2017). *Ekonomitrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews* (Edisi 4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN

